

Achievement Orientation
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

Customer Satisfaction
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

Team Work
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

Integrity
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

Visionary
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

Entrepreneurship
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada



GOOD CORPORATE GAVERNANCE

(Prinsip, Implementasi dan Sumber Kegagalannya)

Disampaikan Dalam
Pembekalan kepada karyawan JOB PERTAMINA – TALISMAN
Mengenai Implementasi Good Corporate Governance
Jakarta, 16 Desember 2013
Jambi 17 Desember 2013

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Universitas Sebelas Maret

(Dosen S1, S2, S3 Fakultas Hukum dan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret)

A. DEFINISI/PENGERTIAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

GOOD GOVERNANCE (Tata kelola yang baik) :

merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. Dalam hal ini *good governance* meliputi cara kerja, aturan, cara pengambilan keputusan dan penerapannya kepada masyarakat luas. Dalam *pengertian good governance* penerapannya berlaku untuk sebuah negara, institusi, atau sebuah perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE :

adalah tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Sama seperti pengertian *Good Governance*, hanya saja biasanya penerapan pengertian *Good Corporate Governance* nya dilakukan oleh sebuah perusahaan

LINGKUP *GOOD GOVERNANCE* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*



B. PERATURAN NASIONAL NEGARA INDONESIA TENTANG GCG

- **KUMPULAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, EDISI PERTAMA 2006**
- **UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSAMENENTANG KORUPSI, 2003)**
- **UU RI NOMOR 7 TAHUN 2006, TENTANG PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003.**
- **UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,**
- **PENJELASAN UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
- **UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
- **UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
- **UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999, TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**
- **PENJELASAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999, TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**

Yang Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT PEMBINAAN KERJA ANTAR KOMISI DAN INSTANSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

C. Corporate Governance



TATA KELOLA PERUSAHAAN

adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.



Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham, pemangku kepentingan menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.



Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti *Enron Corporation* dan *Worldcom*.

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada akhir tahun 2004.

MEMBANGUN TATAKELOLA PERUSAHAAN MENURUT PRINSIP-PRINSIP GCG



Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan.

Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.



Tujuh Prinsip GCG

1. Tidak mementingkan diri sendiri (*selflessness*)
2. Integritas (*integrity*)
3. Obyektivitas (*objectivity*)
4. Keterbukaan (*openness*)
5. Kejujuran (*honesty*)
6. Kepemimpinan (*leadership*)
7. Akuntabilitas (*accountability*)

D. PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE

- Selain itu ada lima prinsip utama yang sekaligus merupakan aspek dasar *corporate governance*, yaitu :
1. Perlindungan hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*)
 2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)
 3. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan (*the role of stakeholders*)
 4. Pengungkapan & transparansi (*disclosure and transparency*)
 5. Tanggung jawab Dewan Direksi (*the responsibilities of the Board*)



➤ PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Kerangka kerja corporate governance harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham, berupa :

- ~ Hak-hak untuk memperoleh metode yang aman atas pencatatan kepemilikan, melakukan pemindahan saham, memperoleh informasi mengenai perusahaan, memberi pendapat & suara dalam rapat umum pemegang saham, memilih anggota dewan direksi & dewan komisaris, & mendapatkan laba perusahaan.
- ~ Hak untuk memperoleh informasi & berpartisipasi secara memadai menyangkut perubahan perusahaan secara fundamental.
- ~ Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak khusus pemegang saham tertentu yang memberikan hak pengendalian secara tdk seimbang



➤ PERANAN STAKEHOLDER YANG TERKAIT DENGAN PERUSAHAAN

Dalam kerangka kerja corporate governance harus mengakui hak-hak *stakeholder*, yaitu :

- ✓ Hak-hak *stakeholder* yang diakui secara hukum harus dihargai
- ✓ Pelanggaran atas hak-hak mereka harus mendapatkan ganti rugi
- ✓ Apabila *stakeholder* ikut dalam pengawasan *corporate governance*, maka mereka harus mendapatkan informasi yang cukup.



- **PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SELURUH PEMEGANG SAHAM**
 - ✓ Semua pemegang saham dari kelompok yang sama harus diperlakukan sama dan adil.
 - ✓ Praktik-praktik seperti *inside trading* & *self-dealing*, yang bersifat penyalahgunaan wewenang & kesempatan harus dilarang
 - ✓ Setiap kemungkinan / potensi *conflict of interest* harus diungkap secara terbuka



➤ **PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI**

- ✓ **Pengungkapan menyangkut hasil keuangan, operasi Perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham, anggota dewan direksi.**
- ✓ **Informasi harus disiapkan & diaudit sesuai standar yang ditentukan.**
- ✓ **Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan keyakinan obyektif.**
- ✓ **Saluran penyebaran informasi harus memberi akses yang wajar, efisien, tepat waktu untuk pemakai yang relevan.**

TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI



- ❖ Anggota dewan bertindak dengan dasar informasi yg lengkap,beritikad baik,serta atas penelitian yang cermat, hati-hati,dan paling baik bagi kepentingan pemegang saham.
- ❖ Dewan direksi harus menjamin ketaatan atas hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder*.
- ❖ Dewan direksi harus memenuhi tugas utama pengelolaan perusahaan dengan *good corporate governance*
- ❖ Dewan direksi harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat,relevan,tepat waktu.



Prinsip *corporate governance* untuk beberapa perusahaan/beberapa badan mungkin berbeda, umumnya mempunyai banyak kesamaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, ada baiknya kita mengutip prinsip yang disiapkan oleh Komite *Nolan* di Inggris, yang dinamakan *the Seven Principles of Public Life*.

E. KEGUNAAN CORPORATE GOVERNANCE



Penerapan corporate governance yang baik akan memberikan keuntungan, sbb :

- 1. Perbaikan dalam komunikasi**
- 2. Peningkatan kepercayaan lebih banyak dari investor**
- 3. Perolehan kepercayaan dari kreditor**
- 4. Perolehan kepercayaan pelanggan**
- 5. Peningkatan efisiensi**
- 6. Peningkatan kinerja perusahaan**
- 7. Pencegahan penyalahgunaan wewenang**



Keuntungan akan memberi dampak positif secara ekonomis, yaitu :

- Meningkatkan penjualan**
- Mudah memperoleh tambahan modal**
- Meningkatkan keuntungan**
- Meningkatkan nilai saham**

F. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU



Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

PRINSIP DASAR YANG HARUS DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN



- ❖ Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
- ❖ Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
- ❖ Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

G. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN



A. NILAI-NILAI PERUSAHAAN

1. Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan.
2. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan.
3. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.



B. ETIKA BISNIS

1. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) .
2. Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan.
3. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.



C. PEDOMAN PERILAKU

Fungsi Pedoman Perilaku :

1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan;
2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

H. IMPLEMENTASI GCG

Analisis implementasi GCG dilakukan dengan mengukur implementasi berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness, serta berdasarkan kerangka kerja GCG yaitu *compliance*, *conformance*, dan *performance*. Selain itu, secara khusus dilihat aspek *code of conduct*, pencegahan korupsi dan *disclosure*.



Sebuah perusahaan wajib memiliki Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Resiko, Komite Asuransi, Komite Kepatuhan, Komite Eksekutif, dan Komite GCG.



Lembaga-lembaga yang berfungsi mengawasi dan membina seperti Bank Indonesia, Meneg BUMN dan Bapepam LK agar lebih proaktif dalam mengawasi implementasi GCG terutama berkaitan dengan potensi terjadinya benturan kepentingan. Selain itu, perlu diterbitkan peraturan yang dapat memaksa perusahaan swasta yang belum terbuka dan BUMD untuk menerapkan GCG.



Implementasi *Good Government* dan *Clean Government* pada institusi pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang mengeluarkan perizinan, dan institusi penegak hukum.

Implementasi GCG pada Perusahaan Manufaktur /Jasa berdasarkan prinsip moral dan etika pada struktur organisasi (*hardware*) dan berdasarkan moral, etika visi dan misi (*software*).

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT
tercermin dalam Wujud Komitmen, sbb :

- ❖ Anggaran Dasar Perusahaan
- ❖ *Board Policy Manual* (BPM)
- ❖ *Corporate Policy Manual* (CPM)
- ❖ Pedoman Perilaku Bisnis (PPB)
- ❖ Pedoman Manajemen Risiko (PMR)
- ❖ Sistem Manajemen
- ❖ *State of Corporate Intent* (SCI)
- ❖ *Contract Management* (KPI)
- ❖ *Internal Audit Charter* (IAC)
- ❖ *Committee Audit Charter* (CAC)
- ❖ *Risk Based Audit*
- ❖ RJP, RKAP, SK. M. BUMN No. 100/MBU/2002
- ❖ Hubungan Anak Perusahaan, Anggota Holding
- ❖ *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- ❖ Peraturan & Perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan GCG

I. PARAMETER IMPLEMENTASI GCG



- ❖ **Compliance** (kepatuhan) yaitu sejauh mana perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang ada dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG;
- ❖ **Conformance** (kesesuaian dan kelengkapan) yaitu sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG dan kelengkapan perangkat dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG
- ❖ **Performance** (unjuk kerja) yaitu sejauh mana perusahaan telah menampilkan bukti (*evidence*) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari perapan prinsip GCG di dalam perusahaan.

J. SUMBER KEGAGALAN CORPORATE GOVERNANCE

Dari sejarah perkembangan *corporate governance*, khususnya di Inggris, kita dapat menelusuri beberapa penyebab kunci kegagalan, yang terjadi di negara lain termasuk Indonesia.



Kegagalan kunci dapat dipilah ke dalam kelompok besar :

- a. Budaya rahasia**
- b. Loyalitas suku**
- c. Kelemahan legislatif**
- d. Kekurangan komitmen**

a. Budaya Rahasia



- ❖ Kerahasiaan misalnya merupakan endemi di masyarakat Inggris, yang masing-masing individunya sulit untuk membagi informasi dg orang lain.
- ❖ Kebiasaan kerahasiaan berkembang dalam lingkungan pemerintahan, perusahaan, dan kegiatan sosial.

Budaya cenderung mendorong suatu sistem tatakelola perusahaan secara diam-diam bukan atas dasar peraturan tertulis yang lengkap, terbuka.

b. Loyalitas Suku



Di Inggris, sekelompok orang yang mempunyai latar belakang golongan, pendidikan yang sama dan merasa dapat kerjasama dg baik.

Sayangnya, perasaan menimbulkan kesetiaan palsu yang tidak pada tempatnya, sehingga kesalahan seorang kolega cenderung untuk ditutupi dan dilindungi. Pengalaman membuktikan meski perusahaan mengalami kegagalan besar, Para penanggung jawab jarang diadili.

c. Kelemahan Legislatif



- ❖ Banyak peraturan hukum di Indonesia, masih warisan zaman Hindia-Belanda.
- ❖ Untuk Indonesia, bukan hanya peraturan perundang-undangan yang belum lengkap atau memadai, tapi penerapan serta pemaksaan undang-undang dan peraturan belum sepenuhnya dalam dilakukan.

d. Kekurangan Komitmen



- Para *stakeholder* mempunyai kepentingan dan agenda sendiri-sendiri.
- Pada hakikatnya para *stakeholder*, kurang mempunyai visi dan keterkaitan erat pada perusahaan, yang seolah-olah berdiri sendiri dan terlepas satu dengan yang lain.

SUMBER



1. **PRINSIP DAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**, Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si.
2. **GOOD CORPORATE GOVERNANCE**, Manuella Suliman dan Riswono.
3. **PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE DAN PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**, <http://pengertianx.blogspot.com/2013/05/makalah>
4. **Literatur GCG**

A young child in a red shirt is holding up the Indonesian flag (Merah Putih) high above their head. The child is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a large, out-of-focus crowd of people, suggesting a public event or gathering. The overall atmosphere is one of national pride and celebration.

Thank You !

08122601681